

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2023

JL.DEPATI SAID No. 01 Kelurahan. TAPAK LEBAR

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGGAU

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL.DEPATI SAID No. 01 Kelurahan. TAPAK LEBAR

Telp. (0733) 321570 Fax. (0733) 321570

LUBUK LINGGAU - Sumatera Selatan 31616

e-mail : pn.lubuklinggau@yahoo.co.id



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
UMUMPENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU**

Jalan Depati Said Nomor 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31616. www.pn-lubuklinggau.go.id, pn.lubuklinggau@yahoo.co.id

Nomor : 227/SEK.W6.U5/KU.07/02/2024 Lubuklinggau, 15 Februari 2024

Lampiran : 1 Bundel

Perihal : Laporan Keuangan Tahun 2023
DIPA 099229

Kepada Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Lubuklinggau Di Lubuklinggau

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, bersama ini kami sampaikan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Laporan Keuangan TA 2023;
- b. Lampiran Laporan Keuangan cetakan Monsakti Per tanggal 31 Desember 2023.

Demikian atas perhatiannya, Kami ucapkan terima kasih.



Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Faira Sukma, S.Kom., SH., MH
NIP 197907092009041002

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Badan Peradilan Umum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Lubuklinggau, 31 Desember 2023

Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
NIP-197907092009041002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	vi
RINGKASAN	vii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xi
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xii
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum.....	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	3
A.4. Basis Akuntansi	4
A.5. Dasar Pengukuran	4
A.6. Kebijakan Akuntansi	4
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	12
B.1 Pendapatan	12
B.2 Belanja Pegawai	15
B.3 Belanja Barang	15
B.4 Belanja Modal.....	16
B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin.....	17
B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan.....	17
B.4.3 Belanja Modal Jaringan	17

B.4.4 Belanja Modal Lainnya	18
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	20
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	20
C.2 Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	20
C.3 Piutang Bukan Pajak	21
C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak.....	21
C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	21
C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	22
(TGR).....	22
C.7 Persediaan.....	22
C.8 Persediaan Yang Belum Diregister	23
C.9 Tanah.....	23
C.10 Peralatan dan Mesin	28
C.11 Gedung dan Bangunan	28
C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan	28
C.13 Aset Tetap Lainnya.....	29
C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan.....	29
C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	30
C.16 Piutang Tagihan TP/TGR	30
C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR.....	31
C.18 Aset Tak Berwujud.....	31
C.19 Aset Lain–Lain	32
C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	32
C.21 Utang kepada Pihak Ketiga.....	33
C.22 Pendapatan Diterima di Muka.....	33
C.23 Uang Muka dari KPPN	34
C.24 Ekuitas	34
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	36

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	36
D.2 Beban Pegawai	36
D.3 Beban Persediaan	37
D.4 Beban Barang dan Jasa	37
D.5. Beban Pemeliharaan	38
D.6 Beban Perjalanan Dinas	39
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi	39
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	40
D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional	40
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	41
E.1 Ekuitas Awal	41
E.2 Defisit LO.....	41
E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	41
E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi.....	41
E.5 Koreksi Lain-lain	41
E.6 Transaksi Antar Entitas.....	41
E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	42
E.6.2 Transfer keluar	42
E.7 Ekuitas Akhir	42
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA.....	203
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	203
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	203
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	203

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	12
Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2023 dan TA 2022.....	13
Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023	13
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022.....	14
Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022	15
Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022	16
Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022	16
Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022	17
Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022.....	17
Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2023 dan TA 2022	18
Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022	18
Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	20
Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 20	
Tabel 14. Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 15. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023....	21
Tabel 16. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	22
Tabel 17. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2023	22
Tabel 18. Rincian Persediaan	23
Tabel 19. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2023	25
Tabel 20. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....	Error! Bookmark not defined.
Tabel 21. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....	33
Tabel 22. Perbandingan Rincian Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	36
Tabel 23. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 24. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	37
Tabel 25. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	38
Tabel 26. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	38
Tabel 27. Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	39
Tabel 28. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022	39
Tabel 29. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.....	40
Tabel 30. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022	40

Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jl. Depati Said No. 1 Kelurahan Sidorejo Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Telp. 0733 321570 Fax. 0733 321570 Kode Pos 31616

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester I Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lubuklinggau, 31 Desember 2023

Sekretaris / Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
NIP-197907092009041002

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Semester I Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari s.d. 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 54.651.000,00 dari estimasi pendapatan sebesar 38.943.000,00 atau mencapai 140.34 persen.

Realisasi Belanja Negara TA 2023 adalah sebesar Rp 372.078.000,00 atau mencapai 98.35 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 378.300.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp 1.034.550,00, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1.034.550,00 Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 1.034.550,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 1.034.550,00 dan Rp 1.034.550

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus (defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan non operasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 54.651.000,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 380.424.133,00 sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 325.773.133). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp (Rp 325.773.133,00) dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar (Rp 325.773.133,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp 1.034.550,00 dikurangi defisit-LO sebesar (Rp 325.773.133,00), kemudian ditambah dengan koreksi yang mengurangi ekuitas sebesar Rp 0,00 dan ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 325.773.133,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp 1.034.550,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023			TA 2022		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN							
1. Pendapatan	B.1	38.943.000,00	54.651.000,00	140,34	31.195.000,00	15.190.000,00	48,69
Jumlah Pendapatan		38.943.000,00	54.651.000,00	140,34	31.195.000,00	15.190.000,00	48,69
BELANJA							
1. Belanja Pegawai	B.2	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
2. Belanja Barang	B.3	378.300.000,00	372.074.500,00	98,35	390.180.000,00	200.983.900,00	51,51
3. Belanja Modal	B.4	-	-	#DIV/0!	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja		378.300.000,00	372.074.500,00	98,35	390.180.000,00	200.983.900,00	51,51

NERACA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
NERACA
PER 31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

1	2	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
ASET			
Aset Lancar	C		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1		
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2	-	-
Piutang Bukan Pajak	C. 3	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 4	-	-
Piutang Bukan Pajak (Netto)		-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 5	-	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 6	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	C. 7		
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 7		-
Persediaan	C. 9	1.034.550	1.034.550
Persediaan yang Belum Diregister	C. 10		
Jumlah Aset Lancar		1.034.550	1.034.550
Aset Tetap			
Tanah	C. 11	-	-
Peralatan dan Mesin	C. 12	-	-
Gedung dan Bangunan	C. 13	-	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C. 14	-	-
Aset Tetap Lainnya	C. 15	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 16		
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 17	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
Piutang Tagihan TP/TGR	C. 18		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C. 19	-	-
Tagihan TP/TGR (Netto)		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C. 18		
Aset Lain-Lain	C. 19	-	-
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 20	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		1.034.550	1.034.550
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 21		-
Utang yang Belum Ditagihkan	C. 22		
Uang Muka dari KPPN	C. 23		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C. 24	1.034.550	1.034.550
JUMLAH EKUITAS		1.034.550	1.034.550
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		1.034.550	1.034.550

LAPORAN OPERASIONAL

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN OPERASIONAL
30 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
PENDAPATAN PERPAJAKAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA		54.651.000	42.970.000
PENDAPATAN HIBAH			
JUMLAH PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	D. 1	54.651.000	42.970.000
JUMLAH PENDAPATAN		54.651.000	42.970.000
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	109.133.633	127.853.338
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	99.630.500	102.078.400
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	1.100.000
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	171.660.000	158.665.000
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8		
JUMLAH BEBAN		380.424.133	389.696.738
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(325.773.133)	(346.726.738)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(325.773.133)	(346.726.738)
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS (DEFISIT) LO		(325.773.133)	(346.726.738)



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengadilan Negeri Lubuklinggau
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
31 Desember 2023 DAN 31 Desember 2022

URAIAN	CATATAN	TA 2023	TA 2022
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	1.034.550,00	2.111.164,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(325.773.133,00)	(346.726.738,00)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN / KESALAHAN MENDASAR			
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3	-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 4	-	-
Koreksi lain-lain	E. 5		
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 6	325.773.133,00	345.650.124,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-	(1.076.614,00)
EKUITAS AKHIR	E. 7	1.034.550,00	1.034.550

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

*Dasar
Hukum*

A.1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor : 90/PMMK.06/2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Negeri
Lubuklinggau*

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2016-2023 merupakan lanjutan dari Renstra Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2010-2015 adalah menguraikan tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dengan Indikator Sasaran dan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2016-2023.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung RI menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN YANG AGUNG”.

Visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau mewujudkan :

- a. Terpenuhinya sumber daya manusia Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dibawahnya yang profesional dan berintegritas.
- b. Terpenuhinya kebutuhan anggaran dan sarana prasarana peradilan yang memadai.

- c. Terlaksananya pelayanan publik yang prima oleh Mahkamah Agung RI dan badan-badan peradilan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau:

Untuk mencapai visi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan dan kuantitas sumber daya manusia.
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran.
5. Meningkatkan kelembagaan/ organisasi peradilan yang efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan.
7. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.
8. Meningkatkan ketatalaksanaan yang berkualitas.
9. Meningkatkan penatausahaan aset negara.
10. Meningkatkan pelayanan administrasi.

Tujuan

Terkoordinasinya pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung .

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan

aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akrual

A.4. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut :

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.

- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kebijakan

Akuntansi

atas

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain :

Uraian	Tahun 2023	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan	38.943.000	38.943.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	38.943.000	38.943.000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	378.300.000	378.300.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	378.300.000	378.300.000

B.1 Pendapatan

Realisasi

Pendapatan Rp

54.651.000,00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 54.651.000,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 38.943.000,00.

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam rupiah)

Kode	Uraian	2023		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan		-	#DIV/0!
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah panitera badan peradilan	210.000,00	20.000,00	9,52
425233	Pendapatan ongkos perkara	6.180.000,00	6.520.000,00	105,50
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	32.553.000,00	48.111.000,00	147,79
425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Bruto		38.943.000,00	54.651.000,00	140,34
Pengembalian		-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Netto		38.943.000,00	54.651.000,00	140,34

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.681.000,00 dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2022.

Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat kenaikan dalam pendapatan uang meja, ongkos perkara, kejaksaan dan peradilan lainnya serta jasa lembaga / jasa giro.

Perbandingan realisasi PNBPN TA 2023 dan TA 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

KODE	Uraian	TA 2023	TA 2022	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
425231	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	-	-	-	#DIV/0!
425232	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan peradilan	20.000,00	110.000,00	(90.000,00)	(81,82)
425233	Pendapatan ongkos perkara	6.520.000,00	7.400.000,00	(880.000,00)	(11,89)
425239	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	48.111.000,00	35.460.000,00	12.651.000,00	35,68
425764	Pendapatan jasa lembaga keuangan / jasa giro	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Pendapatan Netto		54.651.000,00	42.970.000,00	11.681.000,00	27,18

Belanja

Realisasi
Belanja
Negara Rp
372.074.500,00

Realisasi Belanja Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada periode 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp 372.074.500,00 atau 98,35% dari anggaran belanja sebesar Rp 378.300.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	378.300.000,00	372.074.500,00	98,35
53	Belanja Modal	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Bruto		378.300.000,00	372.074.500,00	98,35
Pengembalian Belanja		-	-	
Jumlah Belanja Netto		378.300.000,00	372.074.500,00	98,35

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini :



Realisasi belanja periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar Rp 6.887.900,00 atau sebesar 1,82% dibandingkan realisasi periode 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan belanja barang pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Rincian penyebab kenaikan belanja akan dijelaskan dalam masing-masing jenis belanja.

Perbandingan realisasi belanja periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	#DIV/0!
52	Belanja Barang	372.074.500,00	378.962.400,00	(6.887.900,00)	(1,82)
53	Belanja Modal	-	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Netto		372.074.500,00	378.962.400,00	(6.887.900,00)	(1,82)

B.2 Belanja Pegawai

Belanja
Pegawai
Rp 0,00

Realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Pegawai tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 31 Desember 2022.

Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Uang Lembur	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	#DIV/0!
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	#DIV/0!

Belanja
Barang Rp
372.074.500,00

B.3 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 372.074.500,00 dan Rp 378.962.400,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp 6.887.900,00 atau sebesar 1,82% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2022. Kenaikan ini diakibatkan turunnya biaya barang dan biaya sewa.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	2.964.000,00	1.362.900,00	1.601.100,00	117,48
Belanja Barang Non Operasional	72.666.500,00	76.715.500,00	(4.049.000,00)	(5,28)
Belanja Barang Persediaan	100.784.000,00	118.219.000,00	(17.435.000,00)	(14,75)
Belanja Jasa	24.000.000,00	24.000.000,00	-	-
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas	171.660.000,00	158.665.000,00	12.995.000,00	8,19
Realisasi Belanja Bruto	372.074.500,00	378.962.400,00	(6.887.900,00)	(1,82)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	372.074.500,00	378.962.400,00	(6.887.900,00)	(1,82)

Belanja

Modal Rp 0,00

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal periode 31 Desember 2022. Penurunan ini dikarenakan terdapat penyesuaian sarana dan prasarana untuk menunjang pencapaian Tugas Pokok dan Fungsi.

Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	100,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	100,00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	100,00

Belanja
 Modal Peralatan
 dan Mesin Rp 0,00

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Peralatan dan Mesin	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Belanja
 Modal Gedung dan
 Bangunan Rp 0,00

B.4.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan TA 2022

(dalam rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2023	TA 2022	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Belanja
 Moda Jaringanl Rp
 0,00

B.4.3 Belanja Modal Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jaringan periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rincian Belanja Modal Jaringan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Jaringan TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

Belanja

Modal Lainnya Rp
0,00

B.4.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 31 Desember 2022.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 11. Perbandingan Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan TA 2022*(dalam rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2018	TA 2017	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00
Realisasi Belanja Bruto	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	99,227,700.00	-	99,227,700.00	100.00

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp 0,00,. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 12. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No.	Keterangan	31 Desember 2023	31 Desember TA 2022
1.	Uang Persediaan per 31 Desember 2023	0	0,00
	Jumlah	0	0,00

Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp0,00

C.2 Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00% dikarenakan tidak adanya pelunasan persekot. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Jenis	TA 2023	TA 2022
1.	Persekot Gaji	-	-
JUMLAH		-	-

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.3 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih– Piutang Bukan Pajak Rp0,00

C.4 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 14. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
Nihil					

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Rp0,00

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 15. Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Rp0,00

C.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 16. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Rincian Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
NIHIL					

Persediaan Rp 9.384.183,00

C.7 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 1.034.550,00 dan Rp 1.034.550,00, tidak terjadi kenaikan.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 17. Rincian Persediaan

(dalam rupiah)

No	Uraian	31 Juni 2023	Mutasi	31 Desember 2022
1	Barang Konsumsi	1.034.550,00	-	1.034.550,00
2	Bahan Untuk Pemeliharaan	-	-	-
3	Persediaan lainnya	-	-	-
Jumlah		1.034.550,00	-	1.034.550,00

Nilai persediaan diatas berdasarkan Berita Acara Opname Fisik Persediaan Tanggal 2 Juli 2023. Jumlah persediaan yang rusak/usang yaitu atas barang konsumsi senilai Rp 0,00 dan tidak disajikan dalam neraca pada persediaan.

Persediaan yang belum diregister Rp 0,00

C.8 Persediaan Yang Belum Diregister

Nilai Persediaan yang belum diregister per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Adapun rincian atas persediaan yang belum diregister adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1	Belum di GU kan	(17,420,788.00)
2	Belum di GU kan	(85,384,970.00)
Total		(102,805,758.00)

Tanah Rp 0,00

C.9 Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Lubuklinggau per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2023	0,00

Tabel 18. Rincian Saldo Tanah Per 31 Desember 2023

Peralatan dan
Mesin Rp 0,00

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2021	-
Pembelian	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Transfer Keluar	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Gedung dan
Bangunan Rp
0,00

C.11 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Rp 0,00

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Aset Tetap

C.13 Aset Tetap Lainnya

Lainnya Rp 0,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Pembelian	
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Tidak adanya Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Konstruksi

C.14 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dalam

Pengerjaan Rp
0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%. Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan pembangunan gedung tempat kerja pada Satuan Kerja dibawah lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel dibawah:

Saldo per 31 Desember 2022	-
Perolehan KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-

Tidak ada Mutasi tambah KDP yang terjadi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Akumulasi

C.15 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan
Aset Tetap Rp
0,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Piutang Tagihan
TP/TGR Rp 0,00

C.16 Piutang Tagihan TP/TGR

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada Bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian Negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan Bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Negara karena kelalaiannya.

Piutang Tagihan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Rincian saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	45.291	31 Desember 2022
1.	-	-	-
JUMLAH		-	-

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2023 tidak menggambarkan mutasi yang sebenarnya dikarenakan terdapat kesalahan akun dalam penyeteroran, ralat akun tersebut akan diselesaikan pada Rekonsiliasi bulan Agustus 2023. Rincian nilai yang seharusnya adalah :

calc

Uraian	Nilai TGR	Angsuran	Saldo per 31 Desember
-	-	-	-

C.17 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR

Penyisihan
Piutang Tidak
Tertagih -
Tagihan TP/TGR
Rp 0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 dibandingkan dengan saldo Penyisihan Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2022.

No.	Jumlah Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1.	PT. Amoraindo Utama Karya	Lancar	174,845,880	0,50%	874,229
Total			174,845,880.00		874,229

C.18 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud Rp
0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai Berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2022	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

Aset Lain-Lain
Rp 0,00

C.19 Aset Lain–Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau sebesar 0,00%.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Negeri Lubuklinggau serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut :

(dalam rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 31 Desember 2023	-
Akumulasi Penyusutan	
Nilai Buku	-

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp 0,00

C.20 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp 0,00 dan Rp 0,00, tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar Rp 0,00 atau 0,00%.

Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 30 Desember 2023 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	10,143,724,647.00	(9,304,167,537.00)	839,557,110.00
2	Aset Lain-Lain	2,748,534,960.00	(2,178,305,022.00)	570,229,938.00
Jumlah		12,892,259,607.00	(11,482,472,559.00)	1,409,787,048.00

C.21 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp 0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
		1.958.480.372	

Pendapatan Diterima Dimuka Rp 0,00

C.22 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari pendapatan sewa tanah/gedung yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun.

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka

No	Uraian	Jumlah
	NIHIL	

Uang muka dari
KPPN Rp 0,00

C.23 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp
1.034.550,00

C.24 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.034.550,00 dan Rp 1.034.550,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB
Rp 54.651.000,00

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 54.651.000,00 dan Rp 42.970.000,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari :

Tabel 20. Perbandingan Rincian Pendapatan 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Pendapatan dari pengelolaan BMN serta Pendapatan dari Penjualan				
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	54.651.000,00	42.970.000,00	27,18
Jumlah Pendapatan BMN serta Pendapatan dari Penjualan		54.651.000,00	42.970.000,00	27,18
Pendapatan Lain-Lain				
1	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian	0,00	0,00	100,00
2	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	0,00	100,00
Jumlah Pendapatan Lain-Lain		0,00	0,00	100,00
Total		54.651.000,00	42.970.000,00	27,18

Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan negara bukan pajak Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati said No. 1.

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Rp
0,00

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 21. Perbandingan Rincian Beban Pegawai 30 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Tunj. Anak PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Beban Tunj. Beras PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
10	Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban Uang Lembur	0,00	0,00	-
12	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	-
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

Beban Persediaan

Rp 109.133.633,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 109.133.633,00 dan Rp 127.853.338,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Tabel 22. Perbandingan Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	100.784.000,00	127.853.338,00	(21,17)
2	Beban Persediaan Lainnya	8.349.633,00	0,00	-
Total		109.133.633,00	127.853.338,00	(14,64)

Beban Barang dan

Jasa Rp

99.630.50000

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 99.630.500,00 dan Rp 102.078.400,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 23. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.007.500,00	810.900,00	24,24
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Bahan	34.381.500,00	52.503.000,00	(34,52)
6	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	#DIV/0!
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
8	Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	#DIV/0!
9	Beban Langganan Telepon	0,00	0,00	#DIV/0!
10	Beban Langganan Air	0,00	0,00	#DIV/0!
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
12	Beban Jasa Konsultan	10.000.000,00	10.000.000,00	-
13	Beban Sewa	0,00	0,00	#DIV/0!
14	Beban Jasa Profesi	0,00	0,00	#DIV/0!
15	Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		45.389.000,00	63.313.900,00	(28,31)

Beban
Pemeliharaan Rp
0,00

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 1.100.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022
(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2017	TA 2016	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2,250,133,185.00	2,954,080,055.00	(23.83)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	215,154,000.00	388,234,400.00	100.00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3,256,783,743.00	3,505,563,248.00	(7.10)
4	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	274,641,070.00	219,219,783.00	25.28
5	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	2,410,946.00	77,763,680.00	(96.90)
Total		5,999,122,944.00	7,144,861,166.00	(16.04)

Beban Perjalanan

Dinas Rp

83.480.000,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 171.660.000,00 dan Rp 158.665.000,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 25. Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	620.000,00	1.065.000,00	(41,78)
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	171.040.000,00	157.600.000,00	8,53
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
4	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0,00	0,00	#DIV/0!
5	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		171.660.000,00	158.665.000,00	8,19

Beban Penyusutan

dan Amortisasi Rp

0,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 3Desember 2023 dan 30 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

(dalam Rupiah)

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp 0,00

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Penyusutan		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	#DIV/0!
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	#DIV/0!
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	#DIV/0!
1	Beban Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00	#DIV/0!
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional Rp 0,00

Tabel 27. Rincian Beban Piutang tak Tertagih 31 Desember 2023 dan 30 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang PNBPNBP	-	-	#DIV/0!
2	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	#DIV/0!
3	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	-	-	#DIV/0!
4	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	-	-	#DIV/0!
Total		-	-	#DIV/0!

D.9 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022	Naik (Turun) %
1	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-		#DIV/0!
2	Pendapatan Pelunasan Piutang Non Bendahara	-		#DIV/0!
3	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	-	#DIV/0!
4	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	#DIV/0!
5	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	-	#DIV/0!
6	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-		#DIV/0!
7	Beban Penyesuaian nilai Persediaan	-		#DIV/0!
Total		-	-	#DIV/0!

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp
1.034.550,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.034.550,00 dan Rp 2.111.164,00.

*Defisit LO Rp
(325.773.13300)*

E.2 Defisit LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah defisit sebesar Rp (325.773.133,00) dan Rp (346.726738,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp
0,00*

E.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi Nilai Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp 0,00*

E.4 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

*Koreksi lain-lain
Rp 0,00*

E.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar 0,00 dan Rp 0,00. Koreksi ini merupakan koreksi atas jurnal balik akrual yang telah di Pengadilan Negeri Lubuklinggau per 31 Desember 2022, berupa Temuan BPK RI Tahun 2019 yang belum selesai di Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Temuan BPK RI Tahun 2022	-
Total		-

*Transaksi Antar
Entitas Rp
166.212.133,00*

E.6 Transaksi Antar Entitas

Nilai transaksi antar ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 325.773.133,00 dan Rp 345.650.124,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.351.701.184,00
Diterima dari Entitas Lain	12.160.414,00
Transfer Masuk	
Pengesahan Hibah Langsung	-
	8.363.861.598,00

Diterima dari Entitas Lain / Ditagihkan ke Entitas Lain Rp (12.160.414,00) dan Rp 8.351.701.184

E.6.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp 12.160.414,00 sedangkan DKEL sebesar Rp 8.351.701.184,00.

E.6.2 Transfer keluar

Transfer Keluar Rp (0,00)

Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00

E.7 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Rp 1.034.550

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 1.034.550 dan Rp 1.034.550,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca per 31 Desember 2023 pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Tidak terdapat temuan pemeriksaan BPK RI atas pengadaan barang/jasa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang menuntut penyelesaian berupa pengembalian oleh Pihak Ketiga ke Kas Negara

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1. Terdapat beberapa rekening pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau tahun 2023 MA RI berfungsi sebagai koordinator yaitu menerima uang persediaan (UP) yang kemudian langsung didistribusikan seluruhnya sesuai dengan UP.

Dalam mengelola UP yang diberikan, Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI menyimpan sisa uang UP/TUP pada brankas dan virtual akun. Pada tahun 2022, virtual akun yang dibuka oleh Bendahara Pengeluaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau MA RI sebagai berikut:

Rincian Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu

No.	Unit Kerja	Nomor Rek BRI	Tanggal Pembukaan Rekening
1	Penampung DIPA BUA	653240989701000	S-896/WPB.12/KP.06/2023
2	Penampung DIPA BADILUM	654450992291000	S-896/WPB.12/KP.06/2023
3	Penampungan Perkara	1130014635480	S-384/WPB.07/KP.05/2022

1. Tidak ada penjelasan terkait Jurnal Bantu pada menu Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Umum aplikasi SAIBA 2023.

2. Tidak ada perbaikan Transaksi SPM/SP2D

Bagan Akun Standar					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Satker	: 663157	Rp 15.923.520	Satker	: 663157	Rp 15.923.520
KPPN	: 175		KPPN	: 175	
Akun	: 522112		Akun	: 522113	
Program	: 1070		Program	: 1070	
Kegiatan/Output	: 1070.994		Kegiatan/O	: 1070.994	
Sumber Dana	: 01		Sumber Da	: 01	
Cara Tarik	: 0		Cara Tarik	: 0	
Register P/H	: 00000001		Register P/	: 00000001	
Kewenangan	: KP		Kewenang	: KP	
Lokasi	: 01.51		Lokasi	: 01.51	
Total		Rp 15.923.520	Total		Rp 15.923.520

Bagan Akun Standar					
BAS Semula		Nilai Semula	BAS Koreksi		Nilai Koreksi
Satker	: 663157	Rp 15.923.520	Satker	: 663157	Rp 15.923.5
KPPN	: 175		KPPN	: 175	
Akun	: 522112		Akun	: 522113	
Program	: 1070		Program	: 1070	
Kegiatan/Output	: 1070.994		Kegiatan/C	: 1070.994	
Sumber Dana	: 01		Sumber Da	: 01	
Cara Tarik	: 0		Cara Tarik	: 0	
Register P/H	: 00000001		Register P/	: 00000001	
Kewenangan	: KP		Kewenang	: KP	
Lokasi	: 01.51		Lokasi	: 01.51	
Total		Rp 15.923.520	Total		Rp 15.923.5

3. Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-23/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : SK-337/Pengadilan Negeri Lubuklinggau.3/KPA/XII/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penunjukan Pejabat Penguji/Penandatanganan Surat Permintaan Membayar, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Staf Pengelola Keuangan Di Lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah menunjuk,

Kuasa Pengguna Anggaran	: PATRA SUKMA, S.Kom., S.H., M.H
Pejabat Pembuat Komitmen	: ANDERIANSYAH, S.Kom., M.A.P
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: MULYATI, S.Sos
Bendahara Pengeluaran	: MUTHIA FADILAH, A.Md.
Bendahara Penerimaan	: RUSMAN EDWAR, S.Kom.
Operator SIMAK BMN	: INTAN APRILIA PUTRI, AMd.S.I.
Operator SAIBA / PERSEDIAAN	: INTAN APRILIA PUTRI, AMd.S.I.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU 099229

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM
Tgl Cetak : 19/02/24 8:53 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	378,300,000	372,074,500	(6,225,500)	98	390,180,000	378,962,400	(11,217,600)	97
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.
197907092009041002

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (099229) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:53 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,034,550	2,111,164	(1,076,614)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(325,773,133)	(346,726,738)	20,953,605	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	325,773,133	345,650,124	(19,876,991)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	(1,076,614)	1,076,614	-
EKUITAS AKHIR	1,034,550	1,034,550	0	-

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.

197907092009041002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (099229) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:53 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	1,034,550	1,034,550	0	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	1,034,550	1,034,550	0	0.00
JUMLAH ASET	1,034,550	1,034,550	0	0.00

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	1,034,550	1,034,550	0	0.00
JUMLAH EKUITAS	1,034,550	1,034,550	0	0.00
JUMLAH EKUITAS	1,034,550	1,034,550	0	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1,034,550	1,034,550	0	0.00

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.

197907092009041002

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (099229) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:53 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	54,651,000	42,970,000	11,681,000	27.184
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	54,651,000	42,970,000	11,681,000	27.184
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	54,651,000	42,970,000	11,681,000	27.184
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	109,133,633	127,853,338	(18,719,705)	(14.642)
Beban Barang dan Jasa	99,630,500	102,078,400	(2,447,900)	(2.398)
Beban Pemeliharaan	0	1,100,000	(1,100,000)	(100)
Beban Perjalanan Dinas	171,660,000	158,665,000	12,995,000	8.19
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (099229) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:53 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	380,424,133	389,696,738	(9,272,605)	(2.379)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(325,773,133)	(346,726,738)	20,953,605	(6.043)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(325,773,133)	(346,726,738)	20,953,605	(6.043)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(325,773,133)	(346,726,738)	20,953,605	(6.043)

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.

197907092009041002

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 03 **DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**
WILAYAH/PROVINSI : 1100 **SUMATERA SELATAN**
SATUAN KERJA : 099229 **PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/02/24 8:56 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 19/2/24 7:36 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	3,050,000	3,050,000	2,964,000	0	2,964,000	97.18	86,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,050,000	3,050,000	2,964,000	0	2,964,000	97.18	86,000
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	69,240,000	74,280,000	72,666,500	0	72,666,500	97.83	1,613,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	69,240,000	74,280,000	72,666,500	0	72,666,500	97.83	1,613,500
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	75,600,000	100,800,000	100,784,000	0	100,784,000	99.98	16,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	75,600,000	100,800,000	100,784,000	0	100,784,000	99.98	16,000
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	24,000,000	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,100,000	3,100,000	620,000	0	620,000	20	2,480,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203,310,000	173,070,000	171,040,000	0	171,040,000	98.83	2,030,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	206,410,000	176,170,000	171,660,000	0	171,660,000	97.44	4,510,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	378,300,000	378,300,000	372,074,500	0	372,074,500	98.35	6,225,500
	JUMLAH BELANJA	378,300,000	378,300,000	372,074,500	0	372,074,500	98.35	6,225,500

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (099229) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:25 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:54 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	1,034,550	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	372,074,500
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	54,651,000	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	8,349,633
0.0	391111	Ekuitas	0	1,034,550
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	20,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,520,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	48,111,000
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,964,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	72,666,500	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	24,000,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	620,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	171,040,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	109,133,633	0
JUMLAH			436,109,683	436,109,683

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.

197907092009041002

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (03) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (099229) PENGADILAN NEGERI LUBUK LINGAU

Tgl Data : 19/02/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 19/02/24 8:55 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	372,074,500
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	54,651,000	0
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	20,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	6,520,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	48,111,000
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2,964,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	72,666,500	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	100,784,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	24,000,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	620,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	171,040,000	0
JUMLAH			426,725,500	426,725,500

Keterangan :

FINAL

Lubuklinggau, 19 Februari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris

Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.

197907092009041002